

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Kegunaan Penelitian.....	11
1.5. Kerangka Pemikiran	15
1.6. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
2.1 Teori Kepastian Hukum.....	17
2.2 Teori Ekonomi Analisis <i>Of Law</i>	22
2.3 Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	29
2.4 Tindak Pidana Farmasi	31
2.4.1 Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	31
2.4.2 A. Pengertian Sediaan Farmasi.....	33

B. Pengertian Obat.....	34
C. Pengertian Izin Edar.....	36
D. Kriteria Izin Edar Obat	37
2.5 Teori Hukum Pidana dan Pemidanaan	39
2.5.1 Pengertian Hukum Pidana	39
2.5.2 Pengertian Tindak Pidana.....	41
2.5.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana	46
2.6 Tindak Pidana Farmasi	49
2.7 Pidana Denda Sebagai Alternatif Pidana Penjara.....	55
2.8 Penelitian Terdahulu yang Relevan	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
3.1. Metode yang Digunakan.....	61
3.2. Sumber Data	61
3.3. Alat Pengumpul Data.....	61
3.3.1. Studi Dokumen.....	61
3.3.2. Studi Literatur.....	63
3.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
4.1. Hasil Penelitian.....	64
4.1.1 .Kasus Posisi.....	64
A. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bjr	64
B. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr	70
C. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bjr	76

4.1.2. Pengaturan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	78
4.1.3. Penerapan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	82
4.2. Pembahasan	84
4.2.1. Pengaturan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	84
4.2.2. Penerapan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	90
BAB V PENUTUP	100
5.1. Simpulan.....	100
5.2. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102